



MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET				
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Inspektorat	Terwujudnya transparansi efektivitas dan efisiensi birokrasi	Nilai Matutris SPIP	Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	Level 2 (2,5)	Level 2 (3,1)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,3)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Nlai PMPRB Online	Nlai PMPRB Online	Nlai PMPRB Online	60	1.981.691.400	61	2.398.630.650	62	2.754.562.715	63	2.597.983.400	64	2.714.319.497	65	2.850.035.472			
														Meningkatnya implementasi SPIP pada OPD	Persentase Jumlah OPD yang SPIP yang baik	Jumlah OPD yang nilai SPIP baik per jumlah seluruh OPD dikali 100 %	-		-		20		30		40		50				
														Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti per Jumlah Seluruh Kasus Pengaduan dikali 100%	100		100		100		100		100		100				
														Meningkatnya jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan eksternal dan internal yg ditindaklanjuti per Jumlah Seluruh Temuan eksternal dan internal dikali 100%	89,5		90		90,5		91		91,5		92				
				Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	84,00	89,00	90,00	90,50	91,00	91,30	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen renstra	Jumlah dokumen renstra	78	2.408.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	73,55	81,32	81,50	81,70	81,80	82,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Jumlah Kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang masuk x 100%	100	1.185.018.710	100	297.639.310	100	621.236.150	100	528.769.000	100	552.446.950	100	580.069.296	
					terpenuhinya administrasi dan dokumen kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian										Jumlah PNS yang tertib administrasi dan dokumen kepegawaian dibagi jumlah total aparatur dikali 100%	-	-	81		82		83		84						
					meningkatnya pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan										Jumlah Kebutuhan dibagi jumlah seluruh pegawai x 100%	17	17,6	-		-		-		-						
					meningkatnya kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan	Persentase Penempatan ASN										Jumlah aparatur yang ditempatkan dalam jabatan dibagi jumlah aparatur x 100%	94	81,55	-		-		-		-						
						Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun										Jumlah usulan yang tepat watu dibagi jumlah usulan x 100%	100	-	-		-		-		-		-				
			Peresentase keakuratan data ASN			Jumlah data yang update dibagi jumlah seluruh data x 100%										15	-	-	-		-		-		-						
			Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN			Jumlah usulan yang diverifikasi dibagi jumlah usulan x 100%										76	-	-	-		-		-		-						
			Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan			Jumlah usulan yang diverifikasi tepat waktu dibagi jumlah usulan x 100%										98	-	-	-		-		-		-						
			Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi			Jumlah permohonan ijin belajar dan tugas belajar dibagi jumlah pegawai x 100%										91	-	-	-		-		-		-						
			Persentase penilaian potensi dan kompetensi			Jumlah pegawai yang dinilai potensinya dibagi jumlah pegawai x 100%										19	-	-	-		-		-		-						
			Prosentase penanganan disiplin pegawai			Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang masuk x 100%										100	-	-	-		-		-		-						
			Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK			Jumlah usulan PAK yang diverifikasi dibagi jumlah usulan x 100%										100	-	-	-		-		-		-						
			Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Puma Tugas PNS			Presentase penempatan aparatur dalam jabatan										Persentase penempatan aparatur dalam jabatan	Jumlah aparatur yang ditempatkan dalam jabatan sesuai dengan formasi dibagi jumlah aparatur x100%	-	-		-		-		86		582.468.200		86		802.760.000
			Sekretariat Daerah		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	65	70	72	70	71	73	Program Pemanfaatan Ruang	cakupan kajian pemanfaatan ruang	Cakupan kajian pemanfaatan ruang	Jumlah kajian pemanfaatan ruang	1	36.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	81	82	83	84	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	Cakupan rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	2	31.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	rekomendasi pengembangan potensi sumberdaya alam								Jumlah kajian pengembangan potensi SDA	Realisasi penyusunan kajian pengembangan potensi SDA	1	73.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terpeliharanya aplikasi sistem informasi	Jumlah jejring aplikasi sistem informasi yang dipelihara	Jumlah realisasi aplikasi sistem informasi yang dipelihara	6	44.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-														

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET				
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,6 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terwujudnya forum komunikasi kesandian	Jumlah terseleenggaranya forum kesandian	Realisasi frekuensi forum kesandian dibagi target frekuensi forum kesandian x100%	100	4.701.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
													Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	Cakupan rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	Jumlah rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	1	30.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	cakupan kelompok dan pengrajin	Cakupan kelompok dan pengrajin	Jumlah kelompok dan pengrajin	90	35.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	Cakupan kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	Jumlah kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	47	82.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	cakupan pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	Cakupan pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	Jumlah pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	17	200.092.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terleaksanannya updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Cakupan updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Jumlah dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi yang tervalidasi dibagi jumlah target seluruh dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi x100%	54	108.359.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	Cakupan pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	Jumlah realisasi pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	1	22.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terdata dan tersusunnya arsip di Bagian Umum	Cakupan volume arsip yang terdata	Jumlah realisasi volume arsip yang terdata	20	15.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Program pengembangan budidaya perikanan	cakupan kajian perikanan budidaya	Cakupan kajian perikanan budidaya	jumlah kajian perikanan budidaya	1	14.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya cakupan pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum x100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya dukungan pelayanan kedinasan kepada/wakepda	Persentase cakupan dukungan pelayanan kedinasan kepada/wakepda	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan kepd/wakepda dibagi jumlah target kegiatan kepd/wakepda dikali 100 Persentase	93,8	149.887.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	rancangan produk hukum	Cakupan rancangan produk hukum	jumlah rancangan produk hukum	3	140.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Program pembinaan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan se- Kabupaten Bantul	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum	100	3.419.470.000	100	112.238.250	100	303.030.000	-	-	-	-	-	-	-		
													Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	Meningkatnya kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah seluruh perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen	-	-	100	84.039.250	100	117.385.000	100	70.682.000	73.847.096	100	77.539.451				
															Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah seluruh kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	-	-	1		1							1	1		

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI		REALISASI		TARGET						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET			
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/GI)	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	73.66 (BB)	77.90 (BB)	83 (A)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya pengendalian dan kebijakan	Persentase pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90 Persentase	Jumlah OPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah seluruh OPD x100%	90	0	90	223.506.574	90	244.575.250	90	301.275.000	90	314.765.909	90	330.504.204
													Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Meningkatnya penyusunan SOP Sesuai Tugas/fungsi OPD	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	Jumlah SOP yang disusun dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun x100%	20	269.600.000	40	396.182.000	60	477.043.200	80	310.352.500	100	324.249.894	100	340.462.389
													Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	Jumlah acara kedinasan yang sesuai SOP dibagi jumlah seluruh acara kedinasan x100%	-	-	100	566.950.000	100	561.613.000	100	596.658.000	100	623.375.978	100	654.544.777
													Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan EKPPD	Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan data kali 100 persen	3		3,05		3,10		3,15	736.496.200	3,20	769.476.046	3,25	807.949.849
													Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur/pegawai	Rata-rata Persentase Capaian kinerja aparatur/pegawai x100%	Rata-rata jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi dengan standar jumlah poin x100%	100	495.862.300	100	237.712.300	100	182.159.000	100	129.555.300	100	135.356.707	100	142.124.542
													Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Terciptanya kelembagaan yang efektif dan efisien	Cakupan Kelembagaan yg efektif dan efisien	Besaran kelembagaan yang dapat dibentuk sesuai dengan skor kelembagaan dalam PP 18 tahun 2016 dibagi dengan jumlah kelembagaan yang telah dibentuk x100%	100	185.542.150	100	145.954.500	100	158.785.500	100	121.440.000	100	126.878.008	100	133.221.909
													Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Meningkatnya penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDdes APBDdes) tepat waktu	Jumlah Perdes yg disusun tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %	83	1.109.760.000	83	1.166.376.000	87	1.316.297.500	89	953.368.500	91	996.059.755	92	1.045.862.742
													Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB	11,06	0	11.2	719.094.045	12	774.832.500	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen analisis kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen analisis kajian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen analisis kajian yang dihasilkan	3	1.116.486.058	4	6.240.685.000	4	7.527.975.625	4	8.459.500.889	4	8.838.312.131	4	9.280.227.737
													Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatnya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering	Jumlah proses pengadaan yang mendapatkan pemenang lelangi/ jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan x 100%	-	-	100	859.072.500	100	906.290.000	100	1.205.535.000	100	1.259.518.115	100	1.322.494.021
													Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas kuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase peraturan daerah yang disusun	Jumlah peraturan daerah yang disusun dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanakan sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah kali seratus persen	70%	821.701.303	90%	568.349.000	95%	744.245.000	95%	649.655.200	95%	678.746.360	95%	712.683.678
													Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase dokumen kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Cakupan dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen kajian yang dihasilkan	0	613.000.000	3	588.382.500	4	293.840.000	4	557.600.000	4	582.568.985	4	611.697.434
													Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	meningkatkan kebijakan perekonomian daerah	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh kajian x100%	-	-	33	555.300.000	33	506.605.000	66	622.208.855	100	653.319.298		
														meningkatkan lembaga ekonomi daerah	BUMD yang sehat	Jumlah BUMD yang sehat / jumlah seluruh BUMD x 100%	-	-	66.6		66.6		100		100			
					Program Kerjasama Pembangunan	fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga	Cakupan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	jumlah kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	24	38.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-										
Program perencanaan pembangunan daerah	kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	100	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-															
Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen renja	Cakupan dokumen renja	Jumlah dokumen renja	2	38.250	-	-	-	-	-	-	-	-															
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai			55	52	49	48	45	45			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan daerah	Cakupan tertib pengelolaan keuangan daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100%	100	16.006.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar	27,00	33,00	46,00	52,00	61,00	70,00	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya pelayanan kearsipan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	Hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan Pengguna Arsip (OPD)	75	150.162.900	81,63	81.645.000	81	407.500.000	82,5	207.675.000	83	216.974.559	84	227.823.287
													Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya sistem adminiatriasi kearsipan	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kondisi antara daftar arsip dengan penyimpanan fisik arsip sesuai	17	145.089.800	20	41.823.650	25	131.328.000	30	377.446.588	34	394.348.414	40	414.065.835
													Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya cakupan akuisisi arsip statis	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi dibagi jumlah target arsip statis yang akan di akuisisi x100%	20	249.669.300	26	299.056.480	20	715.860.000	22	950.233.286	24	992.784.148	26	1.042.423.355
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Persentase Layanan Perjinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	75	-	-	-	-	-	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan non perizinan yang valid dan lengkap.	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah jenis izin yang dilayani dalam aplikasi SIM / Jumlah jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan x100%	100	0	100	216.350.000	100	324.075.355	100	105.400.000	100	110.119.747	100	115.625.734	
					Meningkatnya pelayanan perjinan dan non perjinan	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	-	77	79	81	83	85	Program Peningkatan Pengelolaan Perjinan	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	Jumlah izin yang ditetapkan / Jumlah pemohon x100%	100	970.499.934	100	851.135.000	100	806.586.000	100	532.197.575	100	556.029.055	100	583.830.508
															Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah permohonan izin yang dilayani / Jumlah pemohon x100%	100		100		100		100		100		100	
															Cakupan penanganan permasalahan perizinan	Jumlah permasalahan perizinan yang terselesaikan / Jumlah seluruh permasalahan perizinan x100%	100		100		100		100		100		100	
															Jumlah keluhan pelayanan permohonan izin	Jumlah pengaduan terhadap pelayanan CS	-		-		-		-		-		-	
					Hasil survey IKM	Hasil Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78	78,5	79	79,5	80	80,5																
				Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	70	80	85	90	90	90	Program Pelayanan Peningkatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat	cakupan pelayanan PATEN, UMK	Rata-rata peningkatan cakupan pelayanan PATEN dan UMK di 17 Kecamatan	102	6.668.737	139	11.861.309	178	24.201.765	183	19.906.221	184	20.797.609	191	21.837.489
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	Program Pemerintahan Umum	Meningkatnya tertib penyusunan APBDes	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen	58,12	34.087.406	74,41	143.140.162	77,06	125.665.368	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	Program Pemerintahan Umum	Terciptanya harmonisasi APBDes dengan RPJMDes	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	Jml desa yg menyusun RKPDes sesuai RPJMDes dibagi jml seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen	51	47.276.841	85	196.770.386	87	189.522.868	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	Program Pemerintahan Umum	Terciptanya harmonisasi APBDes dengan RPJMDes	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes	Jml desa yg menyusun RKPDes sesuai RPJMDes dibagi jml seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen	-	-	-	-	-	-	89	184.705.294	91	191.244.224	93	200.806.435
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Meningkatnya keselarasan program pembangunan tingkat kecamatan	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100	38	19.383.435	70	30.645.218	82	62.706.503	86	59.789.471	82	62.466.806	84	65.590.147

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET			
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya informasi yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya Good government	Prosentase OPD yang menerapkan layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	60	70	75	80	85	90	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan layanan pengendalian tower	Cakupan tower yang berjin	Persentase tower yang berjin dibagi jumlah seluruh tower dikali 100 persen	-	-	98,81	250.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
													Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	Persentase pengembangan infrastruktur / Jumlah seluruh infrastruktur x100%	60	5.616.010.160	70	7.067.222.000	72	72	14.068.633.200	72	15.091.580.000	75	15.767.371.662	78	16.555.740.245	
															Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Jumlah warehouse data tahun n dikurangi jumlah ware house data n-1 dibagi jumlah ware house data n-1 x100%	40		45	50	52	55	60							
													Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Meningkatnya pengelolaan persandian dan informasi daerah	Persentase Gangguan Informasi yang tertangani-	Jumlah gangguan kemanan informasi yang tertangani dibagi jumlah semua gangguan keamanan informasi X100%	-	-	-	-	-	-	85	709.133.577	86	740.888.142	87	777.932.549		
													Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	Jumlah SDM yang berbasis TI dibagi jumlah seluruh SDM yang ada x100%	45	71.949.500	46	89.847.000	47	78.062.500	48	90.620.000	49	94.677.908	50	99.411.803		
						Index kualitas layanan informasi publik	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatnya cakupan layanan informasi kepada masyarakat	Persentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Sistem informasi dan layanan publik yang memiliki peraturan/ keseluruhan sistem informasi dan layanan publik x 100%	-	-	65	165.495.000	65	1.218.773.200	67	901.765.000	70	942.145.482	75	989.252.756								
											Program kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya jangkauan sosialisasi pembangunan,	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	jumlah sosialisasi tahun n-1 dibagi jumlah sosialisasi tahun N x100%	62	16.967.500	65	2.083.082.200	67	2.193.493.200	70	1.959.960.000	72	2.047.725.802	75	2.150.112.092				
											Program Penyajian Data Statistik Daerah	Meningkatnya pengumpulan pengelolaan dan analisa data statistik daerah.	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data statistik daerah	-	-	-	-	-	-	7	200.935.000	7	221.028.500						
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan KTP	100	100	-	-	-	-	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya jaringan pelayanan administrasi kependudukan melalui desa, lembaga dan masyarakat	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga x100%	100	172.188.910	100	2.619.997.500	100	2.622.558.000	100	2.913.340.500	100	3.043.798.094	100	3.195.987.999
								Persentase cakupan kepemilikanakte kelahiran usia 0-18 tahun	80	85	-	-	-	-			Kepemilikan KTP_EL	Jumlah Kepemilikan KTP-EL / Jumlah wajib KTP x100%	96,22	208346500	97	2908016090	97,5		98		98,5		99	
				Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-	87	89	91	92	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 thn / Jumlah kelahiran usia 0-18 tahun x100%	90,48	1.955.184.120	92	93	94	95	1.244.214.300	95	1.299.929.450	96	1.364.925.923			
				Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	-			-	80	85	90	95			Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Pencari akta kematian Tahun N / Jumlah Kematian Tahun N x100%			55	60	65	70	75							
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,18			81	80,25	80,30	80,35	81	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Jumlah Instansi yang diberi hak akses / Jumlah instansi yang mengajukan ijin pemanfaatan data x100%	0	0	75	0	80	521.925.000	85	476.375.000	90	497.706.779	95	522.592.118		
				Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya implementasi Perda	Persentase Penegakan Perda	57	60	63	66	69	72	Program Penegakan Perda	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak	Jumlah Pelanggaran perda yang ditindak / Jumlah Sasaran x100%	-	-	100	194.270.000	100	242.085.000	100	332.184.000	100	347.058.995	100	364.411.945		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase pemilih yang berpartisipasi	-	-	-	75	-	75	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah pemilih yang berpartisipasi / Jumlah pemilih yang memiliki hak pilih x100%	0%	149.975.300	0%	111.477.250	0%	275.335.000	75%	372.605.000	0%	389.290.023	75%	408.754.524		

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitas pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	80	80	80	80	80	100	Program kerjasama informasi dengan mas media	Tersosialisasikannya kegiatan DPRD melalui media massa	Jumlah publikasi melalui Media Massa	Jumlah publikasi melalui media massa	10	357.188.000	10	603.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya pendataan dan penataan dokumen arsip	Cakupan pendataan dan penataan dokumen arsip	Jumlah dokumen arsip yang tertata/jumlah rencana dokumen arsip yang tertata x100%	12	56.771.000	12	52.613.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai propemperda	Prosentase pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah raperda terbahas/target raperda x 100%	94	8.543.901.775	94	12.929.090.296	80	20.988.685.000	80	20.705.453.983	80	21.632.631.465	80	22.714.263.039
													Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan Rancangan perda prakarsa DPRD	Persentase Perda Prakarsa DPRD	Jumlah raperda prakarsa DPRD terbahas/target raperda prakarsa DPRD x100%	100	1.757.422.387	100	2.673.856.850	-	-	-	-	-	-	-	-
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya pelayanan informasi pembangunan	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Jumlah data yang terisi dibagi seluruh kebutuhan data x100%	80	150.185.000	90	423.415.000	90	366.510.000	95	252.870.000	100	264.193.363	100	277.403.031
													Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya pelayanan informasi data/statistik	Cakupan ketersediaan data statistik	Persentase data statistik daerah yang tersedia dibagi jumlah data yang harus tersedia	80	65.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pelayanan informasi melalui media massa	Cakupan komunikasi media massa	Persentase informasi melalui media massa dibagi dengan jumlah informasi	90	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Kerjasama Pembangunan	Terwujudnya penelitian dan kerjasama yang berdaya guna	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	Kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah dibagi seluruh kerjasama x100%	66,56	14.225.000	73,73	758.301.000	75,33	126.150.000	80	237.900.000	80	248.553.016	86,67	260.980.666
													Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya sinergitas dan kinerja perencanaan pembangunan yang optimal	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Jumlah Persentase capaian sasaran perangkat daerah dibagi jumlah sasaran perangkat daerah x100%	94,05	1.365.496.000	94,20	1.358.403.180	94,35	2.324.349.500	94,5	1.800.105.000	94,75	1.880.712.594	94,9	1.974.748.223
													Program perencanaan ekonomi	Meningkatnya capaian kinerja bidang pembangunan perekonomian	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang pembangunan ekonomi dibagi jumlah sasaran daerah x100%	90,00	1.129.556.000	90,00	658.972.395	100	803.430.000	100	1.466.360.700	100	1.532.023.429	100	1.608.624.601
													Program perencanaan sosial dan budaya	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan sosial budaya	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang pembangunan sosial budaya dibagi jumlah sasaran daerah x100%	90,00	861.122.000	90,00	1.076.597.350	100	1.132.739.500	100	858.840.000	100	897.298.326	100	942.163.243
													Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya capaian kinerja prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dibagi jumlah sasaran daerah x100%	90,00	51.273.000	90,00	438.876.200	100	767.400.000	100	739.025.000	100	772.118.085	100	810.723.989
													Program Perencanaan Perumahan	Terwujudnya pengendalian perumahan	Tersedianya dokumen kajian kebijakan pengembangan perumahan	Persentase dokumen kebijakan pengembangan perumahan yang tersedia	100%	160.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya perencanaan tata ruang	Tersedianya dokumen mengenal rencana tata ruang	Persentase dokumen perencanaan tata ruang	100%	542.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Lingkunga Sehat	Meningkatnya cakupan tatanan kabupaten sehat	Cakupan tatanan kabupaten sehat	Persentase tatanan kabupaten sehat yang dicapai	80%	37.010.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB	-	-	-	-	-	-	12,5	748.409.000	13	781.922.294	13,5	821.018.409
													Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Jumlah IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat dibagi jumlah IPTEKMAS yang ditemukan x100%	75,00	64.750.000	78,00	123.873.350	78,00	212.900.000	78,00	207.720.000	78,50	217.021.574	78,50	227.872.652
					Meningkatnya Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD	-	90,00	90,40	90,75	91,10	91,50	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pengendalian capaian kinerja program OPD yang optimal	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	Jumlah OPD dengan hasil renja predikat tinggi dibagi seluruh OPD x100%	91,00	67.500.000	92,00	145.586.000	93,00	193.120.000	93,50	156.445.000	94,00	163.450.511	94,50	171.623.036

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																			
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET									
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	1	1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tgl ditandatangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	565.449.700	1	534.909.640	1	479.561.000	1	1.017.595.237	1	1.063.162.525	1	1.116.320.652								
															Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n	2		2		2		2													
															Persentase pemohonan revisi DPA dan melebihi standar	Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun x100%	5		5		5		5													
															Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis Akrual	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan		Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)		1		372.899.700		1		315.938.426		1	373.416.000	1	610.557.142	1	637.897.515	1	669.792.391
																	Presentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar		(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) x100%		60				75				80		85		90		95	
																	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual		Jumlah transaksi yang dikoreksi		-				-				-		100		90		85	
															Program Pengelolaan Barang Daerah	Terinventarisasinya aset daerah PD	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1		Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x100%		99.94		609.454.161		100		557.433.430		100	862.589.030	100	837.615.959	100	875.123.886	100	918.880.080
															Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan OPD		Persentase Pemahaman Bendahara Tentang Prosedur dan Tatacara Pengelolaan Keuangan		80		7.210.750		80		126.365.100		-	-	-	-	-	-	-	-
															Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	17		17,5		18		19		20		21		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dibagi pendapatan pajak daerah tahun n-1	8	1.135.933.276	9	1.091.228.700
						Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21	22	23	24	25	26	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Jumah Realisasi PAD dibagi target PAD x100%	100	2.486.246.869	100	2.842.334.912	100	3.311.731.685	100	5.393.254.756	100	5.634.761.384	100	5.916.499.453								